

Bidang Unggulan UB: Good Governance
Kode>Nama Ilmu : 710/Ilmu Pendidikan

LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(P)



Pemetaan, Perancangan dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK)
Dalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

Ketua/Anggota Tim

Dra. Ismarita Ida Rahmiati, M.Pd.	(NIDN. 0026045605)
Ismatul Khasanah, M.Pd., M.Ed., Ph.D.	(NIDN. 0018057502)
Sahiruddin, M.A.	(NIDN. 9907007608)

Diblayai oleh :

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya
Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan
SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 295/SK/2013 tanggal 12 Juni 2013

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
November 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pemetaan, Perancangan, dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsidalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang

Bidang Penelitian : *Good Governance*

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dra. Ismarita Ida Rahmiati, M.Pd

b. NIP : 195604261982032001

c. NIDN : 0026045605

d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

e. Jabatan Struktural : Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris

f. Fakultas/Jurusan : Ilmu Budaya/ Bahasadan Sastra

g. Pusat Penelitian : Pusat Kajian Bahasa dan Sastra

i. Alamat Institusi : Jl Veteran Malang 65145

j. Telpon/Faks/E-mail : (0341) 575822/081235027200/ismarita_ida@ub.ac.id

Lama Penelitian : 1 (satu) tahun

Biaya diusulkan ke DIKTI :

i. Tahun pertama : 50.000.000,-

ii. Tahun kedua : 50.000.000,-

Biaya dari instansi lain :-

Malang, November 2013

Mengetahui,
Pjs Dekan Fakultas Ilmu Budaya



Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS /
NIP. 19530709 198002 1 002

Ketua Peneliti,

Dra. Ismarita Ida Rahmiati, M.Pd
NIP. 195604261982032001

Menyetujui,
Pjs Ketua LPPM UB



Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaimi, MS.
NIP. 19530514 198002 2 001

ABSTRAK

Indonesia sejak tahun 1995 sudah diidentifikasi sebagai lima negara terkorup di dunia. Pada tahun 2012, index persepsi korupsi Indonesia menempati posisi 111 dengan skor 2.8. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat budaya korupsi Indonesia sudah mencapai titik memprihatinkan, dan jika hal ini dibiarkan akan menjadikan bangsa ini semakin terpuruk dan terbelakang. Aspek penegakan hukum atau penindakan (*law enforcement*) tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah nasional ini. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan lewat jalur sosial budaya melalui pendidikan anti korupsi (PAK). Hal ini dalam rangka mengaktifkan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda sebagai *agent of control* dalam setiap penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persepsi para stakeholder yang terlibat dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi beserta kendala-kendala yang dihadapi di sekolah-sekolah SMA di Jawa Timur khususnya di Surabaya, Kota Malang dan Kota Sidoarjo.

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Umum di tiga kota yaitu Surabaya (SMA Negeri 10, SMA 14 Negeri dan SMA Negeri 16), Sidoarjo (SMA Negeri 3 Porong), dan Malang (SMA Negeri 3). Pengambilan data dari Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dilaksanakan dengan jalan wawancara, sedangkan kepada guru dan siswa diberikan kuisisioner. Adapun jumlah responden penelitian ini adalah 5 Kepala Sekolah, 5 Wakil Kepala Sekolah, 165 guru dan 405 siswa.

Berdasarkan angket yang diberikan kepada para siswa dan guru serta hasil wawancara dengan pihak manajemen sekolah, dapat disimpulkan bahwa seluruh civitas akademika di kelima SMA di tiga kota tersebut mendukung terselenggaranya PAK. Mereka sepakat bahwa PAK diintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran dan tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri. Penanaman nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan sejak dini sangat mutlak diperlukan untuk menghindari generasi muda yang korup. Mereka juga berpendapat bahwa PAK ini tidak hanya dilakukan secara formal di dalam kelas saja namun juga dipraktikkan di luar kelas yaitu melalui kantin kejujuran. Disamping itu para guru juga berpendapat bahwa nilai-nilai PAK juga harus diajarkan oleh para guru melalui keteladanan yang dapat dicontoh oleh para siswa. Hal ini dikarenakan PAK diharapkan akan lebih menitikberatkan kegiatannya pada elemen afektif.

Mengingat pentingnya PAK ini, sebaiknya penelitian serupa ditindak lanjuti hingga mencakup wilayah seluruh Indonesia. Disamping itu, setelah pemetaan ini perlu adanya desain pola pembelajaran PAK sebagai pedoman pengajaran PAK di sekolah menengah umum.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Sekolah Menengah Umum, Kota Malang

ABSTRACT

Indonesia since 1995 has been identified as the five most corrupt countries in the world. In 2012, Indonesia's corruption perception index ranks 111 with a score of 2.8. The level of corruption in Indonesia has reached a point of concern, and in future it can lead this country to an underdeveloped country. Law enforcement is not enough to solve this national problem. Prevention and eradication of corruption can be done via social culture aspect through anti-corruption education. This is carried out in order to raise awareness of young generation, as the agent of change in any organization of government, both at local and national level. This study aims to map the perception of the stakeholders involved in the anti-corruption education and their obstacles faced in implementing this anti-corruption education in high schools in East Java, especially in Surabaya, Malang and Sidoarjo.

This research is carried out in high schools in three cities, namely Surabaya (SMAN 10, SMAN 14, and SMAN 16), Sidoarjo (SMAN 3 Porong) and Malang (SMAN 3). The data were taken from interviews with the Principal and Vice Principal, as well as from questionnaire given to the teachers and students. The participants for this research are five principals, five vice principals, 165 teachers, and 405 students.

Based on the result of the questionnaire and the result of the interview, it can be concluded that the entire stakeholders in those high schools in the three cities support the anti-corruption education at schools. They agree that the anti-corruption education should be integrated into other subjects. Furthermore, they also believe that the values of honesty, discipline are absolutely necessary to be taught at early age in order to avoid young generation who like committing corruption. They also argue that the anti-corruption education is not only done formally in the classroom but also practiced outside of class that is through honesty canteen. Teachers also believe that the value of anti-corruption education should be taught by teachers through good modeling from teachers. This is because the PAK activity is expected to be more focused on the affective element.

Given the importance of this, a similar study should be followed up to cover the entire cities in Indonesia. Besides, after mapping it is necessary to design model of anti-corruption education as teaching guides in high school.

Keywords: Anti-corruption education, high school

RINGKASAN

Indonesia sejak tahun 1995-2005 sudah diidentifikasi sebagai lima negara terkorup di dunia (Tii, 2006). Lebih dari itu, masih menurut Tii pada tahun 2009, index persepsi korupsi Indonesia menempati posisi 111 dengan skor 2.8, dan pada tahun 2012, dilaporkan oleh Tii di Berlin bahwa indeks tingkat korupsi di Indonesia naik menjadi peringkat 118 dari 176 negara di dunia Hal ini menunjukkan tindak pidana korupsi semakin kerap terjadi. ¹¹

Perilaku korupsi di Indonesia begitu masif tidak lepas dari tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang rendah khususnya terhadap kesadaran akan perilaku pemberantasan anti korupsi; sebagaimana terefleksi dari data United Nation/PBB bahwa human development index Indonesia menempati posisi 111 dengan skor 0.734 dibawah negara Palestina.

Berbagai peraturan perundangan dan perangkat hukum telah dibuat untuk merespon fenomena korupsi ini akan tetapi praktek korupsi di beberapa lini birokrasi pemerintah dari kejaksanaan, kalangan anggota dewan perwakilan rakyat, maupun di lembaga penegakan hukum sendiri seperti polisi masih tetap marak.

Dalam kondisi seperti ini, diperlukan usaha dari seluruh pihak pihak khususnya lembaga pendidikan tinggi untuk memberikan sumbangsih dalam konteks pencegahan penyebaran perilaku korupsi, sehingga ke depan index korupsi di tanah air, khususnya di provinsi Jawa Timur bisa dihilangkan.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persepsi para stakeholder yang terlibat dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi beserta kendala-kendala yang dihadapi di sekolah-sekolah SMA di Jawa Timur khususnya di Surabaya, Kota Malang dan Kota Sidoarjo.

Pemilihan sekolah-sekolah ini sebagai tempat pengambilan sampel penelitian dengan alasan bahwa sekolah-sekolah di kota tersebut telah lama dijadikan tempat sosialisasi inovasi pendidikan dan juga adanya *political will* dari kota-kota tersebut yang komit terhadap pemberantasan korupsi.

SUMMARY

Indonesia since 1995-2005 has been identified as the five most corrupt countries in the world (TII, 2006). Moreover, still according to TII in 2009, Indonesia's corruption perception index ranks 111 with a score of 2.8, and in 2012, in addition, it was reported by TII in Berlin that the index of the level of corruption in Indonesia rose to rank 118 out of 176 countries in the world. This indicates that corruption becomes more common.

This massive corruption behavior in Indonesia cannot be separated from the level of education of Indonesian people. Moreover, the awareness of the anti-corruption eradication among people is also low, as reflected in the data of the United Nations / United Nations human development index that Indonesia ranks 111 with a score of 0.734 under Palestinian state.

Various laws and legal instruments have been created to respond to the phenomenon of corruption but corruption in the government bureaucracy, the members of parliament, as well as in their own law enforcement agencies such as the police still exist.

Under these conditions, it takes effort from all parties, especially the higher education institutions to contribute in the context of the prevention of the spread of corruption, so that the forward index of corruption in the country, especially in the province of East Java can be eliminated.

This study aims to map the perception of the stakeholders involved in the anti-corruption education and their obstacles in implementing the anti-corruption education faced in high schools in East Java, especially in Surabaya, Malang and Bojonegara.

These schools were taken as sample of research because they have long been used as a place of socialization and educational innovations. Besides, there is a political will of those three cities that are committed to fight corruption.

DAFTAR PUSTAKA

- Borg & Gall, 1993, *Developmental Research in Education*. USA: Oxford Press
- Deal, T.E., and Peterson, K. D. 1999. *Shaping School Culture*. San Fransisco: Jossey-Bass
- Dyson, Laurentius, 2012. *Mengapa Korupsi Terus Tumbuh Subur dalam Perang Panjang Melawan Korupsi*, Sang Guru: Majalah Intelektual Indonesia, Edisi 002 Thn 1 Januari 2012.
- Fadjar, Mukti, 2002, *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar*
Kurniawan, L, 2002, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, Intrans Malang.
- Gani, Andi, 2012, *Upaya Pemberantasan Korupsi dari Perspektif Administrasi Publik dalam Perang Panjang Melawan Korupsi*, Sang Guru: Majalah Intelektual Indonesia, Edisi 002 Thn 1 Januari 2012.
- Harmanto (2008) *Mencari Model Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa SMP dan MTs*. Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Pendidikan Tahun 2008
- Hassan, Fuad. 2004. *Pendidikan adalah Pembudayaan: dalam Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Hermien H.K., 1994, *Korupsi di Indonesia: Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hoy, W.K., Tarter, C., J., & Kottkamp, R.B. 1991. *Open School/Healthy Schools: Measuring Organizational Climate*. Newbury Park, CA: Sage
- Jawa Pos. 30/7/2005. *Mata Pelajaran Anti korupsi di China*.
- Kartono, Kartini. 1983. *Pathologi Sosial*. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press.
- Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010-2025 Pemerintah Republik Indonesia (2010)

Rahayu (2011) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan di SMPN 8 Malang. Unpublished skripsi -Universitas Negeri Malang

Soemanto, RM, 2012. *Tindak Korupsi dan Peranan Masyarakat*, dalam Perang Panjang Melawan Korupsi, Sang Guru: Majalah Intelektual Indonesia, Edisi 002 Thn 1 Januari 2012.

UU No 20/2001 tentang *Tindak Pidana Korupsi dan Pembentukan Lembaga Komite Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

Wijayanto, et.al, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759_korupsi_peringkat_ke_100

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/05/mek2fb-indeks-korupsi-indonesia-naik-indikasi-korupsi-bertambah>

<http://bpp.depdagri.go.id/index.php?action=content&id=2011061712552292>

<http://aparaturnegara.bappenas.go.id/new/berita-243-ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di-indonesia-versi-fitra.html>

<http://www.infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=8297&l=hasil-survei-jaringan-anti-korupsi-surabaya-kota-terkorup-sejawa-timur>

<http://www.sma14sby.com/p/visi-dan-misi.html>

<http://sman-x-sby.sch.id/profil/sma/profil-sekolah>

<http://sman16-sby.sch-id.net/profil.html>

<http://www.sman3-malang.sch.id>

<http://kangmartho.com> (Dokumen Kurikulum 2013. Diambil tanggal 18 Desember 2013)